

Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan

Ana Ramadhani. A^{1✉}, Basri Bado², Sri Astuty³, Muhammad Syafri⁴, Irwandi⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Negeri Makassar, Indonesia

Correspondence Author: anaramadhan17@gmail.com[✉]

Abstrak:

This study aims to analyze the effect of inflation, Gross Regional Domestic Product, and minimum wage on labor absorption in South Sulawesi Province. Labor absorption is used as the dependent variable and is measured by the number of employed people, while inflation, Gross Regional Domestic Product, and minimum wage are used as independent variables measured by the annual inflation rate, constant price regional output, and the applicable minimum wage in each region. The population of this study consists of secondary data related to these variables in Makassar City, Palopo City, Bone Regency, and Parepare City during the 2015–2024 period. The data were obtained from official publications of Statistics Indonesia and the Department of Manpower of South Sulawesi Province. The sample was selected purposively because these regions represent major economic centers in the provincial economic system and provide complete and consistent data. Panel data regression analysis was employed to examine the relationship between variables. The results show that inflation does not have a significant partial effect on labor absorption, while Gross Regional Domestic Product and minimum wage have a positive and significant effect. Simultaneously, the three variables significantly influence labor absorption, indicating that regional economic growth and wage policies play an important role in increasing employment opportunities in South Sulawesi Province.

Kata kunci: Inflasi, PDRB, Upah Minimum, Penyerapan Tenaga Kerja

Submitted	: 27 February 2026
Revised	: 02 March 2026
Acceptance	: 11 March 2026
Publish Online	: 12 March 2026

Pendahuluan

Penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Tingginya tingkat penyerapan tenaga kerja mencerminkan kemampuan perekonomian dalam menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Selain meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat, kesempatan kerja juga berperan dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di suatu wilayah. Oleh karena itu, pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja menjadi sangat penting dalam perumusan kebijakan

ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi yang efektif (Ali et al., 2022; Putri et al., 2024).

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah strategis di Kawasan Timur Indonesia yang memiliki struktur ekonomi yang beragam, meliputi sektor perdagangan, jasa, industri pengolahan, serta pertanian. Kota Makassar berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi utama dengan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi. Sementara itu, Kota Palopo, Kabupaten Bone, dan Kota Parepare memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda dengan dominasi sektor perdagangan, jasa, dan pertanian. Perbedaan struktur ekonomi antarwilayah tersebut dapat memengaruhi kemampuan masing-masing daerah dalam menciptakan kesempatan kerja dan menyerap tenaga kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika penyerapan tenaga kerja dapat berbeda antarwilayah tergantung pada kondisi ekonomi dan pola pembangunan yang terjadi di daerah tersebut.

Secara teoritis, penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor makroekonomi, di antaranya inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan upah minimum. Inflasi merupakan kondisi meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat serta keputusan produksi perusahaan. Inflasi yang relatif stabil dapat mendorong aktivitas ekonomi melalui peningkatan konsumsi dan produksi sehingga berpotensi meningkatkan kesempatan kerja. Namun, inflasi yang tinggi dan tidak stabil justru dapat menurunkan aktivitas ekonomi dan menghambat penciptaan lapangan kerja (Aryansyah et al., 2025).

Selain inflasi, pertumbuhan ekonomi yang tercermin melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga memiliki peran penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan suatu wilayah. Ketika output ekonomi meningkat, perusahaan cenderung melakukan ekspansi kegiatan produksi sehingga membutuhkan tambahan tenaga kerja. Dengan demikian, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah seringkali diikuti oleh peningkatan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja (Ali et al., 2022; Putri et al., 2024).

Faktor lain yang turut memengaruhi dinamika pasar tenaga kerja adalah kebijakan upah minimum. Upah minimum merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi pekerja dengan menetapkan standar upah minimum yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dari perspektif teori efisiensi upah, peningkatan upah dapat meningkatkan produktivitas pekerja dan daya beli masyarakat sehingga mendorong aktivitas ekonomi dan permintaan tenaga kerja. Namun, dari sudut pandang teori neoklasik, peningkatan upah minimum dapat meningkatkan biaya produksi bagi perusahaan dan berpotensi menurunkan permintaan tenaga kerja, terutama pada sektor padat karya (Bhagaskara et al., 2020).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara inflasi, pertumbuhan ekonomi, kebijakan upah minimum, dan penyerapan tenaga kerja. Siallagan (2020) menemukan bahwa secara parsial Produk Domestik Regional Bruto dan upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan inflasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Sementara itu, penelitian oleh Ardiawan et al. (2024) menunjukkan bahwa inflasi, Produk Domestik Regional Bruto, dan upah minimum masing-masing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di beberapa provinsi di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kondisi makroekonomi serta kebijakan pengupahan memiliki peran penting dalam menentukan tingkat kesempatan kerja.

Meskipun demikian, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan temuan yang beragam sehingga hubungan antara inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja masih bersifat kontekstual dan dapat berbeda antarwilayah maupun periode penelitian. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang memerlukan kajian empiris lebih lanjut, khususnya pada tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menganalisis pengaruh inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja menggunakan pendekatan data panel pada empat wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Kota Makassar, Kota Palopo, Kabupaten Bone, dan Kota Parepare selama periode 2015–2024. Pendekatan data panel memungkinkan analisis yang lebih komprehensif karena dapat menggabungkan dimensi waktu dan perbedaan antarwilayah dalam menjelaskan dinamika pasar tenaga kerja.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan kajian ekonomi ketenagakerjaan serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Metode

Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian eksplanatori untuk menganalisis hubungan antara inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian eksplanatori digunakan untuk menguji hubungan antarvariabel serta menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui analisis statistik.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang dikumpulkan meliputi tingkat inflasi, Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan, upah minimum daerah, serta jumlah penduduk bekerja sebagai indikator penyerapan tenaga kerja.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data sekunder yang berkaitan dengan variabel inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), upah minimum, dan penyerapan tenaga kerja pada Kota Makassar, Kota Palopo, Kabupaten Bone, dan Kota Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan. Data tersebut bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKER) Provinsi Sulawesi Selatan. Populasi mencakup data tahunan selama periode 2015–2024 yang menggambarkan perkembangan variabel ekonomi yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja di wilayah penelitian.

Sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan karakteristik ekonomi wilayah serta ketersediaan data yang lengkap dan konsisten selama periode penelitian. Keempat wilayah yang dipilih, yaitu Kota Makassar, Kota Palopo, Kabupaten Bone, dan Kota Parepare, merepresentasikan

simpul utama dalam sistem ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan memiliki peran strategis dalam aktivitas produksi, perdagangan, dan distribusi regional.

Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini meliputi beberapa pertimbangan. Pertama, wilayah penelitian merupakan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki data inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), upah minimum, dan penyerapan tenaga kerja yang tersedia secara lengkap dan berkelanjutan selama periode 2015–2024. Kedua, data yang digunakan bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKER) sehingga memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, wilayah yang dipilih mewakili simpul utama dalam sistem ekonomi provinsi, yaitu Kota Makassar sebagai pusat perdagangan dan industri, Kabupaten Bone sebagai wilayah agraris utama, Kota Palopo sebagai pusat jasa dan perdagangan di kawasan Luwu Raya, serta Kota Parepare sebagai simpul distribusi dan pelabuhan di kawasan Ajatappareng.

Definisi Operasional Variabel dan Teknik Pengumpulan Data

Setiap variabel dalam penelitian ini didefinisikan secara operasional agar dapat diukur secara jelas dan terstandar. Penyerapan tenaga kerja diukur berdasarkan jumlah penduduk yang bekerja pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan dinyatakan dalam satuan orang. Inflasi diukur berdasarkan persentase perubahan tahunan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang menggambarkan perubahan tingkat harga secara umum. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diukur berdasarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah atas dasar harga konstan. Sementara itu, upah minimum diukur berdasarkan besaran upah minimum kabupaten/kota yang ditetapkan pemerintah setiap tahun.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui metode dokumentasi dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) serta instansi pemerintah terkait. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel, yang memungkinkan penggabungan data cross-section dan time-series secara efektif. Analisis ini dilakukan dengan bantuan perangkat lunak statistik EViews 13. Persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} = Penyerapan Tenaga Kerja di daerah i pada tahun t

X_{1it} = Inflasi di daerah i pada tahun t

X_{2it} = PDRB di daerah i pada tahun t

X_{3it} = Upah Minimum di daerah i pada tahun t

β_0 = Intersep/konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi masing-masing variabel independen

ε_{it} = Error term

Pemilihan model estimasi regresi data panel yang paling sesuai, yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, atau *Random Effect Model*, dilakukan melalui serangkaian uji kelayakan model yang meliputi Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji *Lagrange Multiplier*. Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan pengujian asumsi klasik untuk

memastikan validitas model, antara lain uji multikolinearitas untuk mendeteksi adanya hubungan yang kuat antarvariabel independen serta uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi guna memastikan bahwa varians residual bersifat konstan dan bebas dari korelasi antar waktu (Zahriyah et al., 2021; Oliviani, 2023). Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan melalui koefisien determinasi (R^2) untuk menilai kemampuan model dalam menjelaskan variasi penyerapan tenaga kerja, uji F untuk menguji pengaruh inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan upah minimum secara simultan, serta uji t untuk menguji pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap penyerapan tenaga kerja. Seluruh prosedur analisis ini dilakukan secara sistematis guna memastikan bahwa hasil penelitian memiliki dasar statistik yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Aisy, 2022; Sugiyono, 2022).

Hasil Penelitian

Hasil Kelayakan Model

Pemilihan model regresi data panel yang paling tepat dilakukan melalui serangkaian pengujian, yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji *Lagrange Multiplier*. Uji Chow digunakan untuk membandingkan *Common Effect Model (CEM)* dengan *Fixed Effect Model (FEM)* dalam mengestimasi data panel. Selanjutnya, Uji Hausman bertujuan untuk menentukan model yang paling sesuai antara *Fixed Effect Model (FEM)* dan *Random Effect Model (REM)*. Sementara itu, Uji *Lagrange Multiplier (LM)* digunakan untuk membandingkan *Common Effect Model (CEM)* dengan *Random Effect Model (REM)*. Berdasarkan rangkaian pengujian tersebut, ditentukan model estimasi yang paling sesuai untuk digunakan dalam analisis selanjutnya.

Tabel 1. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	303.780433	(3,33)	0.0000
Cross-section Chi-square	134.159203	3	0.0000

Sumber: Olahan Eviews 13, Tahun 2026

Pada Uji Chow, nilai *p-value* sebesar 0,0000 lebih kecil dari tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$), sehingga H_0 ditolak. Dengan demikian, model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model (FEM)*.

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.000000	3	1.0000

Sumber: Olahan Eviews 13, Tahun 2026

Berdasarkan hasil Uji Hausman, diperoleh nilai *p-value* sebesar 1,0000 yang lebih besar dari tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$), sehingga H_0 diterima. Dengan demikian, model yang terpilih adalah *Random Effect Model (REM)*.

Tabel 3. Hasil Uji *Lagrange Multiplier* (LM)

	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	148.3866 (0.0000)	6.349508 (0.0117)	154.7361 (0.0000)

Sumber: Olahan Eviews 13, Tahun 2026

Berdasarkan hasil Uji *Lagrange Multiplier* (Breusch–Pagan), nilai *p-value* pada komponen *cross-section* sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$), sehingga H_0 ditolak. Dengan demikian, model yang terpilih adalah *Random Effect Model* (REM).

Berdasarkan hasil pengujian pemilihan model yang meliputi Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji *Lagrange Multiplier*, dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM). Selanjutnya, hasil estimasi regresi dengan model tersebut disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Regresi Menggunakan Estimator *Random Effect Model* (REM)

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Inflasi	-126.0852	2070.440	-0.060898	0.9518
PDRB	1.608012	0.389867	4.124514	0.0002
Upah Minimum	0.023137	0.007762	2.980937	0.0051
Konstanta	141893.2			
Adjusted R-squared				0.588493
F-hitung				19.59123
				0.00000
Prob. F-hitung				0
N				40

Sumber: Olahan Eviews 13, Tahun 2026

Hasil Regresi dan Interpretasi Persamaan

Hasil estimasi regresi data panel menunjukkan persamaan sebagai berikut:

$$Y_{it} = 141.893,2 - 126,0852X1_{it} + 1,6080X2_{it} + 0,0231X3_{it} + u_i + e_{it}$$

Berdasarkan persamaan tersebut, nilai konstanta sebesar 141.893,2 menunjukkan besarnya penyerapan tenaga kerja ketika seluruh variabel independen, yaitu inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan upah minimum, bernilai nol. Namun, dalam konteks ekonomi riil, interpretasi nilai konstanta ini memiliki keterbatasan karena variabel-variabel makroekonomi tersebut tidak mungkin bernilai nol secara nyata.

Analisis Pengaruh Variabel Independen

1. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 141.893,2. Nilai ini merupakan nilai konstan yang menunjukkan bahwa apabila variabel inflasi (X_1), PDRB (X_2), dan upah minimum (X_3) dianggap bernilai nol atau konstan, maka penyerapan tenaga kerja (Y) adalah sebesar 141.893,2.
2. Koefisien regresi inflasi (X_1) sebesar -126,0852 yang bernilai negatif. Angka ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan inflasi sebesar 1 satuan, maka penyerapan

tenaga kerja akan mengalami penurunan sebesar 126,0852, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Tanda negatif pada koefisien menunjukkan adanya hubungan berlawanan arah antara inflasi dan penyerapan tenaga kerja, di mana peningkatan inflasi cenderung menurunkan penyerapan tenaga kerja.

3. Koefisien regresi PDRB (X_2) sebesar 1,6080 yang bernilai positif. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan PDRB sebesar 1 satuan, maka penyerapan tenaga kerja akan meningkat sebesar 1,6080, dengan asumsi variabel lain tetap. Tanda positif pada koefisien menunjukkan adanya hubungan searah antara PDRB dan penyerapan tenaga kerja, sehingga semakin tinggi PDRB suatu daerah, maka penyerapan tenaga kerja akan semakin meningkat.
4. Koefisien regresi upah minimum (X_3) sebesar 0,0231 yang bernilai positif. Angka ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan upah minimum sebesar 1 satuan, maka penyerapan tenaga kerja akan meningkat sebesar 0,0231, dengan asumsi variabel lain konstan. Koefisien positif tersebut mengindikasikan adanya hubungan searah antara upah minimum dan penyerapan tenaga kerja, sehingga peningkatan upah minimum tidak menurunkan kesempatan kerja, melainkan diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Hasil Asumsi Klasik

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Centered VIF
Inflasi	1.023510
PDRB	1.059201
Upah Minimum	1.062100

Sumber: Olahan Eviews 13, Tahun 2026

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, seluruh variabel independen memiliki nilai Centered Variance Inflation Factor (VIF) yang lebih kecil dari 10, yaitu inflasi sebesar 1,023510, PDRB sebesar 1,059201, dan upah minimum sebesar 1,062100. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas antarvariabel independen dalam model regresi, sehingga model layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Obs*R-squared	3.660328
Prob. Chi-Square(3)	0.3006

Sumber: Olahan Eviews 13, Tahun 2026

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, diperoleh nilai probabilitas *Chi-Square* sebesar 0,3006 yang lebih besar dari tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model regresi, sehingga model memenuhi asumsi homoskedastisitas.

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi

Obs*R-squared	0.417993
---------------	----------

Prob. Chi-Square(2)	0.8114
Sumber: Olahan Eviews 13, Tahun 2026	

Berdasarkan hasil uji autokorelasi menggunakan Breusch-Godfre, diperoleh nilai probabilitas *Chi-Square* sebesar 0,8114 yang lebih besar dari tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model regresi, sehingga model memenuhi asumsi independensi residual.

Hasil Uji Hipotesis

1. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan tabel 4 di atas, nilai Adjusted R-squared sebesar 0,5885 menunjukkan bahwa setelah dilakukan penyesuaian terhadap jumlah variabel dalam model, sekitar 58,85% variasi penyerapan tenaga kerja dapat dijelaskan oleh variabel inflasi, PDRB, dan upah minimum. Artinya, ketiga variabel tersebut secara bersama-sama memiliki kemampuan yang cukup kuat dalam menjelaskan perubahan tingkat penyerapan tenaga kerja, sementara sisanya 41,15% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

2. Hasil Uji F (Uji Signifikansi Simultan)

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F) pada tabel 4, diperoleh nilai F-hitung sebesar 19,5912 yang lebih besar dari F-tabel 2,86 serta nilai probabilitas 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, H_4 diterima, yang menunjukkan bahwa inflasi, PDRB, dan upah minimum secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menegaskan bahwa kondisi makroekonomi dan kebijakan pengupahan secara simultan memainkan peran penting dalam menentukan tingkat penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut.

3. Uji t (Uji Signifikansi Parsial)

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F), diperoleh nilai F-hitung sebesar 19,5912 yang lebih besar dari F-tabel 2,86 serta nilai probabilitas 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, H_4 diterima, yang menunjukkan bahwa inflasi, PDRB, dan upah minimum secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menegaskan bahwa kondisi makroekonomi dan kebijakan pengupahan secara simultan memainkan peran penting dalam menentukan tingkat penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut.

Pembahasan

1. Pengaruh Parsial Inflasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2015–2024. Arah hubungan negatif ini mengindikasikan bahwa kenaikan inflasi cenderung diikuti oleh penurunan penyerapan tenaga kerja, meskipun pengaruh tersebut belum cukup kuat secara statistik. Fenomena ini sejalan dengan teori Keynesian yang menyatakan bahwa inflasi tidak selalu berdampak langsung terhadap pasar tenaga kerja, khususnya ketika inflasi berada pada tingkat ringan hingga sedang. Data menunjukkan bahwa inflasi di empat kabupaten/kota penelitian relatif terkendali dan bersifat temporer, sehingga tidak secara langsung memengaruhi keputusan perusahaan dalam menambah atau mengurangi tenaga kerja. Temuan ini konsisten dengan penelitian [Desra Siallagan \(2020\)](#), [Sinta Nur Kholipah \(2020\)](#), serta [Ari Rudatin et al. \(2024\)](#) yang juga menemukan

bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

2. Pengaruh Parsial Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2024

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Fenomena ini sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi yang menyatakan bahwa peningkatan output ekonomi, yang tercermin dari kenaikan PDRB, akan mendorong peningkatan kebutuhan terhadap faktor produksi, termasuk tenaga kerja, untuk memenuhi permintaan pasar terhadap barang dan jasa. Data menunjukkan adanya tren peningkatan PDRB di empat kabupaten/kota penelitian selama periode 2015–2024, terutama di Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, yang diikuti oleh perluasan aktivitas produksi dan investasi. Kenaikan nilai tambah ekonomi tersebut berkontribusi langsung pada peningkatan kesempatan kerja, baik di sektor jasa, perdagangan, maupun industri pengolahan. Temuan ini sejalan dengan penelitian [Ali et al. \(2022\)](#), [Putri et al. \(2024\)](#), serta [Warapsari et al. \(2021\)](#) yang juga menemukan hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja.

3. Pengaruh Parsial Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan. Temuan ini sejalan dengan pendekatan Keynesian dan teori efficiency wage yang menyatakan bahwa peningkatan upah dapat meningkatkan daya beli pekerja, mendorong konsumsi rumah tangga, dan pada akhirnya meningkatkan permintaan agregat. Data menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum di empat kabupaten/kota penelitian selama periode 2015–2024 masih berada pada tingkat yang dapat diimbangi oleh pelaku usaha, terutama di sektor jasa, perdagangan, dan UMKM. Kondisi tersebut mendorong pelaku usaha untuk mempertahankan bahkan menambah tenaga kerja seiring meningkatnya permintaan pasar. Temuan ini konsisten dengan [penelitian Ahkamul Hakim \(2022\)](#) dan [Rizki Oliviani \(2023\)](#) yang menyatakan bahwa kebijakan upah minimum dapat berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja ketika didukung oleh kondisi ekonomi yang stabil.

4. Pengaruh Simultan Inflasi, PDRB, dan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2024

Hasil estimasi regresi data panel menunjukkan bahwa inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan upah minimum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2015–2024. Hal ini dibuktikan oleh nilai F-hitung sebesar 19,5912 yang lebih besar dari F-tabel (2,86) serta nilai probabilitas 0,0000 ($<0,05$). Nilai Adjusted R^2 sebesar 0,5885 mengindikasikan bahwa 58,85 persen variasi penyerapan tenaga kerja di Kota Makassar, Kota Palopo, Kabupaten Bone, dan Kota Parepare dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Temuan ini menegaskan bahwa kombinasi pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan kebijakan pengupahan memiliki peran penting dalam membentuk dinamika pasar tenaga kerja daerah.

Secara empiris, hasil simultan tersebut sejalan dengan kondisi rata-rata ekonomi masing-masing wilayah. Kota Makassar mencatat rata-rata penyerapan tenaga kerja tertinggi sebesar 584.433 orang, didukung oleh rata-rata PDRB sebesar Rp119.218 miliar,

meskipun rata-rata inflasi 3,30 persen dan upah minimum Rp2.946.548 menuntut peningkatan produktivitas agar pertumbuhan tetap padat karya. Kabupaten Bone menunjukkan rata-rata penyerapan tenaga kerja sebesar 347.844 orang dengan rata-rata PDRB Rp21.735 miliar dan inflasi 2,94 persen, namun struktur ekonomi berbasis sektor primer membuat peningkatan upah minimum berpotensi menekan usaha kecil. Sementara itu, Kota Palopo dan Kota Parepare memiliki skala ekonomi lebih kecil dengan rata-rata penyerapan tenaga kerja masing-masing sebesar 74.572 dan 65.796 orang, didukung oleh inflasi yang relatif terkendali (di bawah 3 persen) serta PDRB yang berkembang moderat.

Secara teoretis, temuan ini sejalan dengan pendekatan Keynesian dan teori permintaan tenaga kerja yang menyatakan bahwa pertumbuhan output dan peningkatan pendapatan secara simultan akan mendorong permintaan tenaga kerja, meskipun efeknya sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi daerah. Di satu sisi, peningkatan PDRB dan upah minimum berdampak positif melalui perluasan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat, namun di sisi lain, inflasi dan kenaikan biaya tenaga kerja berpotensi menekan penyerapan tenaga kerja apabila tidak diimbangi oleh peningkatan produktivitas. Dengan demikian, kebijakan pembangunan daerah yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan pengupahan yang berkeadilan menjadi kunci dalam mendorong penyerapan tenaga kerja yang berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan pada periode 2015–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan inflasi tidak memberikan pengaruh yang kuat terhadap peningkatan maupun penurunan jumlah tenaga kerja yang terserap di wilayah penelitian. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Peningkatan aktivitas ekonomi daerah yang tercermin dari pertumbuhan PDRB mampu mendorong bertambahnya kesempatan kerja di wilayah penelitian. Upah minimum juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Kenaikan upah minimum tidak menurunkan kesempatan kerja, melainkan tetap diikuti dengan peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap. Secara bersama-sama, inflasi, PDRB, dan upah minimum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah, perkembangan aktivitas produksi, serta kebijakan pengupahan.

Saran

Pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar, Kota Palopo, Kabupaten Bone, dan Kota Parepare, diharapkan dapat mendorong kebijakan pembangunan yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Pengembangan sektor-sektor ekonomi yang memiliki kemampuan menyerap banyak tenaga kerja perlu menjadi perhatian utama agar peningkatan aktivitas ekonomi dapat diikuti dengan bertambahnya lapangan kerja. Selain itu, kebijakan penetapan upah minimum perlu dilakukan secara seimbang dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah sehingga dapat meningkatkan

kesejahteraan pekerja tanpa menghambat aktivitas usaha. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat menjaga stabilitas harga agar kondisi ekonomi tetap kondusif bagi perkembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja, seperti investasi, perkembangan teknologi, partisipasi kerja perempuan, serta tingkat pendidikan tenaga kerja. Penambahan variabel tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja di daerah.

Daftar Pustaka

- Aisy, A. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Dalam Analisis Ekonomi*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Ali, M., Rahman, A., & Yusuf, M. (2022). The effect of economic growth on employment absorption in regional economies. *Journal Of Economic Development Studies*, 7(2):85-97.
- Ardiawan, I., Pratama, D., & Wulandari, S. (2024). Inflation, regional economic growth, and minimum wage on employment absorption in Indonesia. *International Journal Of Economics And Policy Studies*, 9(1):45-58.
- Aryansyah, R., Nugroho, A., & Lestari, P. (2025). Inflation dynamics and labor market performance in developing regions. *Journal Of Macroeconomic Research*, 12(1):22-34.
- Bhagaskara, A., Putra, R., & Sari, D. (2020). Minimum wage policy and labor demand in developing economies. *Economic Policy Review*, 8(3):110-121.
- Hakimin, A. (2022). Pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(1):55-66.
- Kholipah, S. N. (2020). Analisis pengaruh inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(2):134-142.
- Oliviani, R. (2023). Minimum wage policy and employment absorption in regional labor markets. *Journal Of Regional Economic Analysis*, 11(2):71-83.
- Putri, N., Hidayat, T., & Saputra, R. (2024). Regional economic growth and employment opportunities in Indonesia. *Journal Of Regional Development Studies*, 10(1):33-47.
- Rudatin, A., Prasetyo, B., & Wicaksono, D. (2024). Inflation and employment absorption in regional economies. *International Journal Of Applied Economics*, 6(2):90-101.
- Siallagan, D. (2020). Pengaruh produk domestik regional bruto dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 18(1):1-12.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Warapsari, D., Utami, S., & Nugraha, A. (2021). Economic growth and labor absorption in Indonesian regions. *Journal Of Development Economics*, 9(2):102-113.
- Zahriyah, L., Kurniawan, H., & Prasetyo, E. (2021). Panel data regression analysis in economic research. *Journal Of Quantitative Economics*, 5(2):66-78.